



LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024

LAPORAN AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN 2024



BPR Gunadhana Mitrasembada
Mitra Usaha Anda

I. PENDAHULUAN

BPR Gunadhana Mitrasembada (BPR GM) adalah salah satu Bank Perekonomian Rakyat di Kota Bandung. BPR GM menyadari pentingnya bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, BPR GM berupaya mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengedepankan kerja sama multisektor. Kerjasama semacam ini akan menjamin keberlangsungan bisnis dan pada akhirnya juga dapat memberi manfaat bersama bagi BPR GM dan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. BPR GM menyadari bahwa keberlanjutan akan sulit dicapai tanpa adanya dukungan kerjasama dan sinergi yang kuat untuk menjaga keseimbangan masyarakat, bumi dan keuntungan serta mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup melalui rencana pengembangan penyaluran dana agar memenuhi kesesuaian dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, BPR GM berupaya membangun visi keberlanjutan bersama para mitra dan para pemangku kepentingan. Dari kesamaan visi tersebut, perumusan langkah-langkah yang sinergis untuk menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan aksi nyata bersama dapat lebih mudah dilaksanakan. Sebagai wujud komitmen dalam memajukan bisnis perusahaan, BPR GM berupaya terus memperluas sinergi untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Selama masa pemulihan ekonomi dari efek pandemi ini, BPR GM berupaya memperluas kerja sama di beberapa sektor yang memiliki potensi ekonomi. Kolaborasi multisektor seperti itu sangat menguntungkan guna mendorong pemulihan ekonomi daerah dan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Dengan akselerasi kerja sama ekonomi ini, proses pemulihan ekonomi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih tangguh dalam menghadapi potensi risiko.

II. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

BPR Gunadhana Mitrasembada tergolong BPRKU1 pertama kali menerapkan keuangan berkelanjutan mulai tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 belum ada pencapaian rencana aksi keuangan berkelanjutan.

2. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Utama BPR Gunadhana Mitrasembada

visi : menjadi BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh masyarakat

Misi :

- Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat
- Membantu pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Mewujudkan pertumbuhan bank agar dapat menghasilkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pengurus dan pemegang saham.

b. Visi dalam implementasi keuangan berkelanjutan:

Menjadi BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh masyarakat dengan memerhatikan keselarasana aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Misi dalam implementasi keuangan berkelanjutan:

Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ramah lingkungan.

3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas tata kelola bank dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hidup serta peningkatan portfolio kredit pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, dan untuk mendorong sistem keuangan agar lebih memperhatikan aspek lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance/ESG) dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi.

4. Program yang akan Dilaksanakan

4.1. Pencapaian rencana aksi selama 1 tahun

Selama periode tahun 2024, BPR Gunadhana Mitrasembada sudah menjalankan program keuangan berkelanjutan yang dirancang dan difokuskan pada rencana yang sudah ditetapkan yaitu :

- a. Mengurangi penggunaan kertas.
- b. memisahkan sampah organik dan non organik
- c. berupa pemberian kredit multiguna kepada karyawan instansi untuk pembelian motor listrik.

No	Bulan	Implementasi Kegiatan
1	Januari s.d Desember	<p>Analisa tentang penggunaan kertas di BPR</p> <p>Jumlah penggunaan kertas di BPR mulai dari bulan Januari 2024 s.d Desember 2024 mengalami efisiensi yang cukup signifikan, jumlah penggunaan kertas selama tahun 2024 sebanyak 22.319 lembar yang terdiri dari Kertas A4 11.310, Kertas PK 6.100, kertas Kop Surat 2.148, Kertas perpanjangan Deposito 1.872 dan F4 889, Hal ini menurun sekitar 20 % dari tahun sebelumnya.</p> <p>sebagai bukti lain BPR Gunadhana Mitrasembada juga mendukung aksi pengurangan dampak perubahan iklim dengan Efisiensi penggunaan kertas Kertas dan tinta BPR GM mengencarkan digitalisasi layanan.baik permohonan kredit atau tansaksi pembayaran kredit, permohonan kredit melalui website dan media sosial BPR GM serta Transaksi elektronik dengan layanan Virtual account atau melalui gerai Pembayaran terdekat Alfamart dan Indomaret, sebagai upaya percepatan dan perbaikan layanan nasabah kini tak perlu repot bepergian ke untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan.</p> <p>Aplikasi-aplikasi digital dapat membuat proses bisnis lebih efisien sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya Efisiensi yang bisa didapat dari Layanan transaksi digital yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Efisiensi waktu karena nasabah bisa lebih cepat dalam melakukan permohonan kredit dan pembayaran kredit2. Efisiensi emisi tidak perlu lagi berkendara untuk pengajuan bisa melalui Media sosial atau website BPR GM3. Kecepatan dan Kenyamanan calon nasabah dalam melakukan permohonan atau transaksi Kredit.
2	Januari s.d Desember	<p>Pengenalan kepada seluruh karyawan untuk pemisahan sampah organik dan non organik</p> <p>Pengenalan kepada seluruh karyawan untuk pemisahan sampah organik dan non organik di kalangan internal BPR GM salah satu konsentrasi dalam upaya aksi keuangan berkelanjutan agar berjalan secara konsinten dengan cara memperkenalkan dan menyediakan tempat sampah yang yang disediakan untuk sampah organik dan non organik di setiap ruang kerja dan unit kerja yang ada selalu disediakan tempat sampah untuk sampah organik dan non organik.</p>
3	Januari s.d Maret	<p>Penjajakan dengan mitra instansi untuk penyaluran kredit multiguna motor listrik yang tergolong kepada kredit aksi keuangan yang berkelanjutan.</p>

		Januari s.d Maret Penjajakan dengan mitra instansi untuk penyaluran kredit multiguna motor listrik yang tergolong kepada kredit aksi keuangan yang berkelanjutan yang dapat mengurangi polusi dimana BPR GM sebagai Perusahaan jasa keuangan mendukung mitra instansi untuk pengadaan Kendaraan ramah lingkungan yaitu Motor Listrik mitra instansi memiliki rencana pengadaan motor listrik menggunakan merek yang diajukan oleh mitra instansi yaitu merek Motrik dimana mitra instansi harus menyiapkan semua saran dan prasarana untuk maintenance kedepannya karena untuk merek tersebut tidak memiliki dealer dan service center di kota bandung sehingga berganti dengan merek Yadea dan United dimana kedua merek tersebut memiliki service center yang berada di bandung untuk yadea yaitu dengan indo mobil yang berada di jalan soekarno hatta dan jalan veteran ,sedang United memiliki service center united sendiri di jalan ciatel kota bandung hanya untuk produk ini tidak berjalan karena permintaan dari mitra instansi yang masih memperhitungkan dari segi keuangan internal dan BPR GM juga harus memperhitungkan perhitungan resiko untuk BPR yang akan menjalankan kreditnya untukantisipasi terjadi gagal bayar.
4	April	Melakukan kajian risiko atas permintaan pasar untuk penyaluran kredit multiguna karyawan instansi untuk investasi pembelian kendaraan motor listrik. April Melakukan kajian risiko atas permintaan pasar untuk penyaluran kredit multiguna karyawan instansi untuk investasi pembelian kendaraan motor listrik. Kajian resiko untuk keberlangsungan usaha BPR sebagai Pemberi kredit kepada karyawan mitra instansi masih sangat beresiko dengan dampak yang cukup signifikan sebagai bahan pertimbangan apabila terjadi gagal bayar dari karyawan instansi yang sudah bermitra dimana menjual kembali motor listrik bekas serta minat masyarakat terhadap motor listrik yang masih sangat rendah atau sedikit sekali tidak sebanyak motor dengan BBM.
5	Mei	Penyaluran kredit multiguna karyawan instansi yang bertujuan untuk investasi pembelian kendaraan motor listrik yang tergolong kepada kendaraan yang ramah lingkungan. Mei Penyaluran kredit multiguna karyawan instansi yang bertujuan untuk investasi pembelian kendaraan motor listrik yang tergolong kepada kendaraan yang ramah lingkungan. Karena masalah keuangan internal mitra instansi dan pertimbangan kajian resiko diatas pada poin ke 4 maka untuk kredit multiguna motor listrik tidak dijalankan.

5. Program yang akan Dilaksanakan

5.1. Rencana aksi 1 tahun

Untuk periode tahun 2025, BPR Gunadhana Mitrasembada mencanangkan ulang program keuangan berkelanjutan yang dirancang dikarenakan ada beberapa program yang tidak bisa berjalan karena berbagai hal, Adapun rencana program keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ramah lingkungan yaitu :

- A. Tetap melakukan efisiensi penggunaan kertas
- B. Mengurangi penggunaan Listrik dan Air.
- C. Meminimalisir penggunaan barang yang berbahan plastic karena sulit terurai
- D. Memiliki acuan kerja keuangan berkelanjutan dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan pada produk-produk dengan jenis penggunaan yang sesuai dengan program ekonomi keuangan berkelanjutan.

Tabel.1 Rencana AKB 1 tahun

No	Bulan	Uraian Kegiatan
1	Januari s.d Desember	Analisa tentang penggunaan kertas
2	Januari s.d Desember	Pemisahan sampah organik dan non organik
3	Januari s.d Desember	Analisa tentang penggunaan listrik dan air di BPR
4	Januari s.d	Pengenalan kepada seluruh karyawan untuk penggunaan barang non

	Desember	plastic di lingkungan BPR yang susah untuk terurai.
5	Januari s.d Maret	Pembuatan rencana bisnis di BPR yang sesuai dengan program ekonomi keuangan berkelanjutan
6	Januari s.d Desember	Pertumbuhan penyaluran kredit yang bertujuan sesuai dengan rencana ekonomi keuangan berkelanjutan seperti pertanian, perkebunan dan usaha daur ulang limbah sebesar 10 % dari tahun 2024

5.2. Rencana aksi 5 tahun

Tabel.2 Rencana AKB 5 tahun

No	Tahun	Uraian Kegiatan
1	2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisienfi penggunaan kertas. 2. Pemisahan sampah. 3. Mengurangi penggunaan Listrik dan Air. 4. Meminimalisir penggunaan barang yang berbahan plastik karena sulit terurai. 5. Memiliki acuan kerja keuangan berkelanjutan dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan pada prodak-prodak dengan jenis penggunaan yang sesuai dengan program ekonomi keuangan berkelanjutan. 6. Pelatihan keuangan berkelanjutan bagi seluruh pegawai BPR. 7. Pelatihan Supervisor marketing, analis kredit dan marketing atas kelengkapan bisnis berbasis keuangan berkelanjutan dan pengetahuan penyaluran kredit yang berorientasi pada keberlangsungan lingkungan
2	2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan yang berfokus pada tata cara atau kebiasaan dalam berorganisasi yang berhubungan dengan penghematan energi, penggunaan listrik, air dan botol plastik dalam kegiatan internal bank 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pelatihan dan asesmen.
3	2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian atas permintaan pasar untuk kredit yang tergolong pada tujuan keuangan berkelanjutan. 2. Penyaluran kredit multiguna dan UMKM yang berfokus pada usaha atau tujuan yang tergolong ramah lingkungan
4	2028	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran karyawan akan keuangan berkelanjutan. 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pelatihan dan asesmen

6. Alokasi Sumber Daya

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, BPR akan mengalokasikan sumber daya berupa :

- 1) Dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2) SDM yang menjalankan adalah bagian Operasional dan Pemasaran.

7. Penanggung Jawab

Tabel.3 Penanggung jawab kegiatan Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penanggung Jawab	Tugas DAN Tanggung Jawab
Direksi	Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BPR secara keseluruhan
Supervisor Marketing	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab kepada Direksi terhadap RAKB BPR secara keseluruhan b. Mengelola RAKB di BPR c. Menyusun RAKB BPR d. Memproyeksikan Pertumbuhan Penyaluran Kredit kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan e. Menyusun laporan realisasi RAKB
Kepala Opsional	<ol style="list-style-type: none"> a. Support Penyusunan RAKB BPR b. Memonitoring Pelaksanaan RAKB BPR

	c. Menyusun Laporan Pelaksanaan AKB
Supervisor dan Marketing	a. Melakukan penawaran kredit baik langsung kepada calon debitur atau melalui media sosial b. Menyusun Laporan Pelaksanaan AKB
Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan & Fungsi Manrisk	a. Menyusun Pedoman Perusahaan RAKB BPR b. Melakukan review dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap RAKB BPRk c. Melakukan monitoring risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan RAKB BPR
HRD	a. Melakukan kajian/analisa khusus pengelola RAKB BPR. b. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait RAKB BPR
IT	Melakukan pembuatan pengajuan pembuatan design brosur, spanduk, banner dll terkait RAKB berdasarkan pengajuan dari bagian Umum
Bagian Umum	Menerima pengajuan pembuatan brosur, spanduk, banner dll terkait RAKB dari bagian Pemasaran

III. PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Rujukan

Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini dilandasi dari Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa rujukan mengenai keuangan berkelanjutan di antaranya :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 – 2025.
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- d. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
- f. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;

2. Keterlibatan Para Pihak

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPR GM berkewajiban untuk membuat RAKB sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK dimaksud, BPR melakukan proses RAKB untuk tahun 2025.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RAKB tahun 2025 adalah Direksi, Supervisor Marketing, Marketing, Kepala Operasional, PE Kepatuhan dan Manrisk, HRD, IT dan Bagian Umum, dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Tabel.4 Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Proses
1	Sosialisasi Peraturan OJK
2	Perumusan Road Map RAKB thn 2025
3	Perumusan Format isian RAKB thn 2025
4	Pengumpulan data kepada Unit Kerja terkait
5	Proyeksi Penyaluran Kredit kepada kategori Usha Berkelanjutan
6	Penyusunan RAKB
7	Persetujuan Komisaris

IV. FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pada tahun 2020 Kondisi pasar mengalami penurunan diakibatkan pandemic COVID-19, meskipun demikian sampai dengan saat ini outstanding kredit yang diberikan BPR GM tetap meningkat dengan baki debet sebesar Rp. 56.206.531 ribu meningkat sebesar 25,17% (yoy).

1. Rencana strategi bisnis

Dalam upaya meningkatkan kinerja, BPR berencana untuk menerapkan strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan diharapkan juga dapat berdampak positif guna mendorong percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Jawa Barat. Di tengah berkembangnya ekonomi digital, BPR senantiasa terus mengembangkan ekosistem yang dimiliki dengan perbaikan produk dan fitur.

Sejalan dengan Rencana Bisnis BPR Gunadhana Mitrasembada tahun 2025 BPR GM akan melakukan implementasi awal Keuangan Berkelanjutan hingga tahun 2028, adapun kegiatan unggulan RAKB adalah penyaluran kredit yang sudah dialokasikan sesuai dengan target pada Rencana Bisnis Bank baik program kerja maupun prioritas rencana yang disusun.

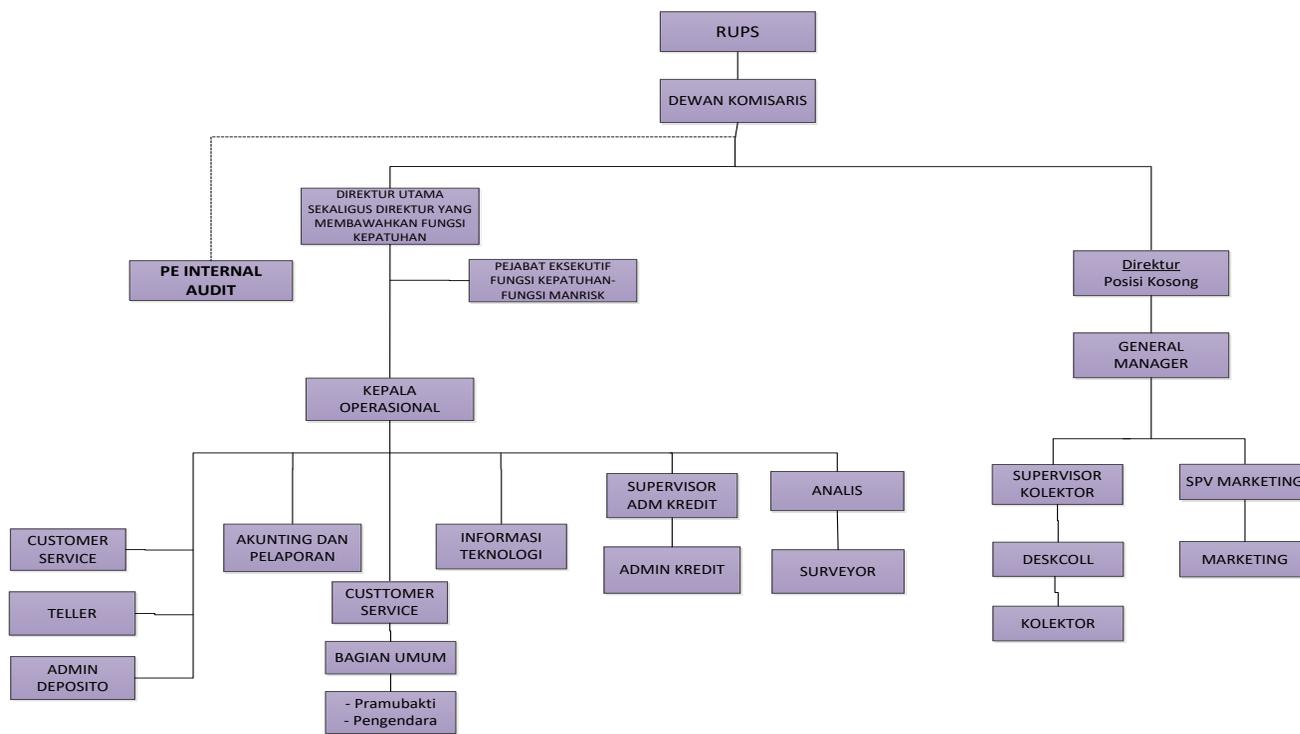
Di sisi lain, BPR GM tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada perbaikan ekosistem lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan dan kesenjangan masyarakat, terutama dalam masa pemulihan ekonomi. BPR menyadari tanggung jawabnya secara berkelanjutan dengan membantu masyarakat sekitar yang terkena dampak negatif dari pandemi, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Menyesuaikan dengan permintaan pasar arah kebijakan BPR akan difokuskan kepada peningkatan profitabilitas penyaluran kredit sesuai dengan tujuan RAKB.

2. Kapasitas organisasi

a. Kepengurusan

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada baru memiliki 1(satu) anggota Direksi dan 1(satu) anggota Dewan Komisaris, sehingga masih kurang 1(satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Direksi.

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA**



b. Sumber Daya Manusia

Direksi dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang meliputi Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan merangkap fungsi Manajemen Risiko dan Program APU, PPT & PPPSPM, Kepala Bagian Operasional. Untuk kebutuhan bisnis (Kredit, Funding dan Penagihan) telah dilengkapi Supervisor Marketing dan Supervisor Kolektor. Komposisi pegawai sbb:

Tabel.5 Komposisi Pegawai

Unit Kerja	Level Pejabat	Jumlah Pegawai
Operasional	1 orang	10 orang
Kredit	3 orang	13 orang
Audit Intern	1 orang	-
Kepatuhan/Manrisk	1 orang	-

BPR melakukan peningkatan SDM berupa peningkatan kompetensi melalui pendidikan, Pelatihan, dan pengembangan karyawan sesuai kebutuhan.

Sesuai strategi, BPR akan meningkatkan kompetensi inti karyawan dengan membiayai pelatihan karyawan dan memberikan kompetensi yg baik agar dapat terus bersaing. Selain memberikan fasilitas tersebut, BPR pun melakukan evaluasi kualitas karyawan agar jenjang karir tetap berjalan.

Untuk mendukung aksi keuangan berkelanjutan, pengembangan SDM dilakukan secara berkesinambungan dengan mengikutsertakan pengurus dan pegawai pada pelatihan-pelatihan kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Selain memberikan perhatian kepada masyarakat dan nasabah, BPR GM tidak melupakan tanggung jawab terhadap para pegawainya. BPR GM memberikan lingkungan kerja yang terbebas dari diskriminasi dengan menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh pemangku kepentingan. BPR GM mengacu pada prinsip kesetaraan dalam menjalankan usaha dengan dukungan SDM yang kompeten. Melalui RUPS BPR GM menjunjung tinggi persamaan hak asasi

manusia dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, serta kedudukan social.

3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada per posisi 31 Desember 2024 memiliki modal inti Rp. 8.629.882.446,- dan volume usaha sebesar Rp. 81.910.944.910,- Dengan total kredit sebesar Rp. 53.852.646.995,-

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada per posisi 31 Desember 2024 memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (kpmm) yang relatif tinggi.

Table.6 Proyeksi Rasio Keuangan BPR GM

Rasio Keuangan	Desember 2024
CAR	19,11 %
LDR	71,06 %
Cash Rasio	7,22 %
ROA	-1,31 %
BOPO	109,77 %
NPL	16,16 %
NIM	6,97 %

4. Kerjasama dengan pihak eksternal

Dalam rangka meningkatkan portfolio kredit PT. BPR Gunadhana Mitrasembada juga melakukan kerjasama dengan lembaga Koperasi Instansi dalam penyaluran kredit, khususnya pada usaha-usaha produktif yang berwawasan lingkungan.

5. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang diterapkan adalah Eksternal dan Internal yang aktif dan partisipatif. Penerapan strategi komunikasi selalu memperhatikan budaya sopan santun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

5.1. Komunikasi Eksternal

BPR membangun komunikasi eksternal yang terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan eksternal melalui aktivitas komunikasi dan pengelolaan media komunikasi yang dimiliki sebagai berikut :

- a. Membangun komunikasi dua arah dengan nasabah dengan tujuan mengkomunikasikan penawaran kredit ramah lingkungan.
- b. Menjalin hubungan baik dengan media untuk meningkatkan pemberitaan positif dalam rangka penyebarluasan informasi baik kredit maupun perkembangan BPR.
- c. Pengelolaan aktivitas dan media komunikasi promosi produk dan layanan bank kepada masyarakat luas dengan content menarik serta memperhatikan ketentuan dari OJK.

5.2. Komunikasi Internal

Dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja serta upaya memastikan karyawan BPR telah terinformasi dengan baik mengenai informasi terkini, BPR GM senantiasa melakukan aktivitas komunikasi internal dan pengelolaan komunikasi internal diantaranya melalui grup medsos, local area network, ataupun komunikasi langsung.

6. Sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan saat ini di BPR Gunadhana Mitrasembada dilakukan melalui Bagian Marketing dan Kepala Opeasional, evaluasi rencana kerja, project dan lainnya dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi dan penyesuaian disisi kebijakan/SOP yang melibatkan bagian terkait, sehingga masalah yang terjadi kedepannya dapat dimitigasi dengan baik. Selain itu juga dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan mitigasi yang baik.

6.1. Monitoring

Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RAKB , BPR GM memiliki sejumlah mekanisma monitoring, antara lain :

- a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
BPR GM menyelenggarakan Rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit 4 kali dalam 1 tahun, hal ini dilakukan untuk memonitoring perkembangan terkini terhadap berbagai program kerja BPR.
- b. Mengukur dan Memonitoring Kinerja Bisnis
BPR GM melakukan monitoring kinerja bisnis serta memberikan evaluasi yang lebih obyektif dan terukur sebagai dasar pemberian reward dan punishment sehingga karyawan lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaan.
- c. Operasional Meeting
BPR melaksanakan meeting berkala pada divisi Operasional dalam rangka memeriksa apakah RAKB telah dilaksanakan.
- d. Business Meeting
BPR melaksanakan business meeting secara rutin dalam rangka memonitoring kinerja unit bisnis.

6.2. Mitigasi

BPR menyadari adanya risiko yang timbul terutama pada kegiatan penyaluran kredit untuk agunan motor listrik. Dengan demikian BPR membuat kerangka untuk memitigasi kemungkinan kegiatan tersebut terdapat permasalahan.

Dalam melakukan mitigasi yang dilakukan oleh BPR sebagai berikut :

- a. Selalu berkoordinasi dengan pengelola/pejabat instansi/koperasi yang mengelola pembayaran angsuran.
- b. Membuat cadangan kerugian seminimal mungkin.
- c. Mencantumkan klausul pengamanan untuk BPR pada Perjanjian Kredit.
- d. Menunjuk team sebagai kegiatan monitoring dan mitigasi.
- e. Menerapkan asuransi kerugian pada agunan yang dijaminakan apabila terjadi sesuatu hal pada agunan tersebut.
- f. Langkah terakhir penyerahan agunan apabila debitur tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada BPR.

7. Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah menetapkan, OJK telah mengeluarkan POJK No.51/POJK.03/2017 dan POJK No.60/POJK.04/2017 sebagai implementasi road map Keuangan Berkelanjutan 2020-2025.

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan Keuangan Berkelanjutan Kebijakan pemerintah mendorong BPR Gunadhana Mitrasembada untuk mengimplementasikan isu Keuangan Berkelanjutan dan Tujuan Keuangan Berkelanjutan.

V. PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

BPR GM menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No.60/POJK.04/2017 dan memperhatikan factor-faktor eksternal dan internal.

Program : Peningkatan Portfolio Kredit difokuskan pada kredit pertanian, perkebunan dan usaha daur ulang limbah diharapkan berkembang baik.

a. Dasar Pemikiran

Untuk tercapainya keuangan berkelanjutan, BPR harus didukung oleh masyarakat yang ekonominya semakin meningkat. Usaha mikro merupakan pihak yang harus dijadikan sasaran peningkatan ekonominya melalui pemberian pinjaman yang lebih berpihak, sehingga pada gilirannya akan menopang pengembangan keuangan berkelanjutan bagi BPR.

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Efisiensi Penggunaan Kertas	01/01/2025	31/03/2025	Seluruh Bagian	Kepala Operasional

2	Pemisahan sampah organik dan non organik	01/01/2025	31/03/2025	Seluruh Bagian	Kepala Operasional
1	Efisiensi pemakaian Air dan Listrik	01/01/2025	31/03/2025	Seluruh Bagian	Kepala Operasional
2	Pengurangan penggunaan bahan yang berbahan dasar plastik dalam kegiatan sehari hari	01/01/2025	31/12/2025	Seluruh Bagian	Kepala Operasional
2	Pengarahan dan implementasi target pencapaian pertumbuhan kredit yang berorientasi pada ekonomi berkelanjutan	01/01/2025	31/03/2025	Bagian Marketing	General Manager
3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian penggunaan listrik dan Air. Melakukan kajian atas penggunaan alat berbahan non plastik. Melakukan kajian risiko atas permintaan pasar untuk penyaluran kredit yang berorientasi pada ekonomi berkelanjutan. 	01/01/2025	31/03/2025	PE Manajemen Risiko	PE Manajemen Risiko
4	Penyaluran kredit dengan tujuan penggunaan usaha pertanian, perkebunan dan daur ulang.	01/05/2025	31/12/2025	Bagian Marketing	General Manager

c. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola aksi keuangan berkelanjutan diberikan kepada unit Operasional dan Pemasaran/Marketing bekerjasama dengan bagian lain yang tercantum pada table.3.

Implementasi program keuangan berkelanjutan dengan prioritas pengembangan internal yang difokuskan pada portofolio kredit dalam penyaluran dana dan menggunakan alokasi sumber dana masyarakat berupa dana pihak ketiga.

Dana yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan program tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,-

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari RAKB ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi program RAKB dibandingkan dengan timeline dan penilaian kinerja yang telah direncanakan.
2. Realisasi penyaluran kredit kepada kegiatan kredit ramah lingkungan dibandingkan dengan anggaran dan indicator kinerja yang direncanakan.
3. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan usaha terhadap target yang telah ditetapkan

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan terutama berasal dari faktor eksternal yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai ataupun kondisi sosial politik yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Tantangan lainnya sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas SDM.
 - Banyak lembaga keuangan belum memahami secara utuh prinsip Environmental, Social, Governance (ESG).
 - Minimnya pelatihan internal tentang evaluasi risiko lingkungan dan sosial.
2. Keterbatasan Produk dan Instrumen Hijau.
 - Belum banyak produk kredit atau investasi yang secara spesifik ditujukan untuk sektor berkelanjutan (seperti obligasi hijau, kredit hijau).
 - Peluang besar di sektor energi terbarukan atau pertanian organik belum sepenuhnya digarap.
3. Biaya Awal yang Relatif Tinggi
 - Proyek berkelanjutan seringkali membutuhkan modal awal yang lebih besar (misalnya: teknologi bersih).
 - Lembaga keuangan ragu karena waktu balik modal yang lebih panjang.

V. TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

V.1. Penanggungjawab Monitoring & Evaluasi RAKB

Evaluasi atas pelaksanaan RAKB akan dilakukan dengan melibatkan level *management* sampai pegawai bawah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Evaluasi akan setiap kegiatan dilakukan oleh seluruh bagian. Indikator keberhasilan dari RAKB ini akan menjadi target dan komitmen BPR Gunadhana Mitrasembada yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank 2025.

Evaluasi di level Direksi akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian rencana aksi (waktu dan hasil) dengan pelaksanaan program tetapi juga dengan melakukan review terhadap kemungkinan adanya program yang harus mundur atau dipercepat sesuai dengan kondisi lapangan, target pencapaian, sumber daya yang dibutuhkan.

Sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

Tabel.7. bagian yang melakukan monitoring RAKB

Aktivitas	Unit Kerja	PIC
Monitoring Realisasi Penunjukan Unit Pengelola AKB	PE Fungsi Kepatuhan & Manrisk	PE Kepatuhan & Manrisk
Monitoring Realisasi Standar Penyusunan Operasional dan Prosedur AKB	PE Fungsi Kepatuhan & Manrisk	PE Kepatuhan & Manrisk
Monitoring Pelaksanaan Edukasi	HRD	HRD

Internal		
Monitoring Penyaluran Kredit kepada AKB	• Divisi Marketing	General Manager
Monitoring Profil Risiko Kredit	PE Fungsi Manrisk	Divisi Manrisk
Evaluasi Program RAKB	Divisi Marketing	General Manager
Monitoring Pelaksanaan efisiensi pemakaian kertas	Divisi Operasional	Kepala Operasional

V.2. penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikas efektivitas realisasi RAKB diperlukan pengukuran secara berkala yang dilaporkan kepada Direksi. Adapun penentuan waktu pelaporan sebagai berikut :

Tabel.8 Penentuan waktu pelaporan AKB

Aktivitas	Periode	Unit Kerja
Laporan RAKB	Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager • Kepala Operasional
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Pemakaian Kertas • Laporan Kegiatan Pemisahan sampah organik dan non organik • Laporan Realisasi Penyaluran Kredit AKB 	Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Operasional • General Manager

1. Pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* dan evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatas berada di bawah Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

V.3 Tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
- Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

V.4 Mitigasi risiko

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas, sehingga dapat segera dilakukan pengendalian yang menyeluruh.

V.4.1. Pemetaan Risiko

Tidak berjalannya RAKB dapat berdampak pada sejumlah risiko yang dikelola BPR. Pemetaan RAKB sebagai berikut :

Tabel.8 Pemetaan Risiko AKB

Jenis Risiko	Potensi Risiko
Risiko Kredit	Pelaku kegiatan usaha kategori berkelanjutan gagal memenuhi kewajiban
Risiko Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrative berupa teguran atau peringatan tertulis bagi BPR yang tidak menerapkan AKB • Berpotensi mempengaruhi nilai TKS BPR

V.4.2. Manajemen Risiko atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Tata Kelola Risiko

- a. Pembentukan Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan
- b. penyusunan kebijakan berupa Pedoman Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.
- c. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap RAKB termasuk penyaluran kredit kepada kegiatan usaha kategori berkelanjutan.
- d. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko.

2. Kerangka Manajemen Risiko

- a. Strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko dan kecukupan perangkat organisasi dalam terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
 - b. Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance.
 - c. Rencana Bisnis Bank disusun bersama Pengurus dan seluruh bagian terkait serta disosialisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
3. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia
- a. proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Pengendalian Risiko
 - 1) Terkait dengan Risiko Kredit
 - a) On desk dan on site atas perkembangan usaha dan kredit nasabah serta akan mengoptimalkan mekanisme pengawasan antara lain maker, checker, approval, terhadap seluruh proses dan dokumen pemantau kredit.
 - b) Pemantauan perkreditan yang ketat untuk kolektibilitas 1 dan 2 agar tidak flow ke kolek NPL.
 - 2) Terkait Risiko Kepatuhan
Melakukan sosialisasi terkait RAKB kepada seluruh pegawai BPR GM.
 - 3) Terkait Risiko Operasional
Melakukan pelaksanaan RAKB dan memantau pelaksanaannya oleh seluruh bagian terkait.

- 4) Terkait Risiko Likuiditas
Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dana BPR
terkait RAKB.

Bandung, 30 April 2025

Disusun oleh,



Endah Sri Lestari
Direktur Utama



Disetujui oleh,



Cecilia Hansel
Komisaris Utama